

PENYUSUNAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH BANYUWANGI DENGAN SFI DAN SWOT MATRIX ANALYSIS

Suryaning Bawono¹

¹Universitas Jember, ninobalmy@gmail.com

Abstrak

Banyuwangi merupakan kota yang unik dengan beragam potensi daerah yang perlu dirumuskan untuk dikelola lebih baik lagi. SFI atau Scanning, Formulation dan Implementation, merupakan tahapan penyusunan rencana strategi pengelolaan. Didalam paper ini, penyusunan rencana strategi pengelolaan menggunakan model growth strategy, diformulasikan dengan swot matrix dan digambarkan didalam business model canvas untuk mendapatkan gambaran strategi pengelolaan sumber daya daerah Banyuwangi yang dapat diimplementasikan didalam realita.

Kata Kunci: SFI,SWOT Matrix, Business Model Canvas, Growth Strategy Model.

Abstract

Banyuwangi is the unique city with potential variety must be formulated for better potential regional management. SFI is stage of preparation strategy method. In this paper, we use SWOT Matrix Analysis, Business Model Canvas, and Growth Strategy Model for construct Banyuwangi regional resource management strategy.

Keywords: SFI,SWOT Matrix, Business Model Canvas,Growth Strategy Model.

PENDAHULUAN

Banyuwangi merupakan kota diujung timur pulau jawa dengan luas 5.782,5 km². Banyuwangi memiliki daerah dataran tinggi atau pegunungan di sisi baratnya dan juga memiliki daerah pantai disisi timurnya. Daerah pegunungan dan pantai yang menyatu dalam satu daerah merupakan sebuah keunikan tersendiri. Tentunya hal tersebut menyimpan potensi dan kekayaan daerah yang harus dikelola dengan baik.

Potensi daerah Banyuwangi sangatlah beragam dan untuk mengelolanya, tentunya membutuhkan pemetaan potensi, penggambaran sumber daya yang dimiliki, peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan dan penyusunan strategi pengelolaan yang dapat diimplementasikan untuk mengelola sumber daya daerah Kabupaten Banyuwangi.

Denise Lindsey Wells(1998) menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah pendekatan sistem untuk mengidentifikasi dan membuat perubahan yang diperlukan dan mengukur kinerja organisasi. Manajemen strategi tidak hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan. Namun juga dapat diaplikasikan pada pemerintah daerah.

Derby (2010) menjelaskan bahwa Strategi Pertumbuhan Perusahaan merespons serangkaian strategi nasional, perkembangan regional dan lokal. Membuat visi dukungan perusahaan baru. memberikan dasar bagi Dewan dan Perusahaan Daerah. Kemitraan dalam mendukung bisnis dan mendukung Visi ekonomi sebagai bagian yang lebih luas. Ulrich Ernst.dkk (2004) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diukur sebagai kenaikan produk domestik bruto (PDB) percapita, disesuaikan dengan paritas daya beli. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDB harus disertai dengan pengentasan kemiskinan, dengan kata lain berkurangnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Strategy Pertumbuhan atau growth strategy merupakan strategi sustainable development dimana strategi disusun berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang akan dicapai dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Miguel Angel Toro-Jarrín, Idalia Estefania Ponce-Jaramillo, David Güemes-Castorena (2016) menjelaskan bahwa Model Bisnis Kanvas mengidentifikasi bagian penting dari sebuah bisnis. Alexandre Joyce, Raymond L. Paquin (2016) menjelaskan bahwa business model canvas adalah alat untuk mengeksplorasi model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan inovasi.

Zeynel Abidin Polat, Mehmet Alkan, Hicret Gürsoy Sürmeneli (2017) menjelaskan bahwa Metode SWOT adalah memperbaiki dasar informasi kuantitatif dari proses perencanaan strategis. Jadi, SWOT memberikan garis besar dasar untuk melakukan analisis terhadap situasi pengambilan keputusan. Boonyarat Phadermrod, Richard M. Crowder, Gary B. Wills (2016) menjelaskan Analisis SWOT, alat yang umum digunakan untuk perencanaan strategis. Untuk meningkatkan performance SWOT menggunakan SWOT Matrik yang kemudian berkembang menjadi Importance-Performance Analysis based SWOT analysis dengan memperhatikan signifikansi dari pemetaan SWOT tersebut.

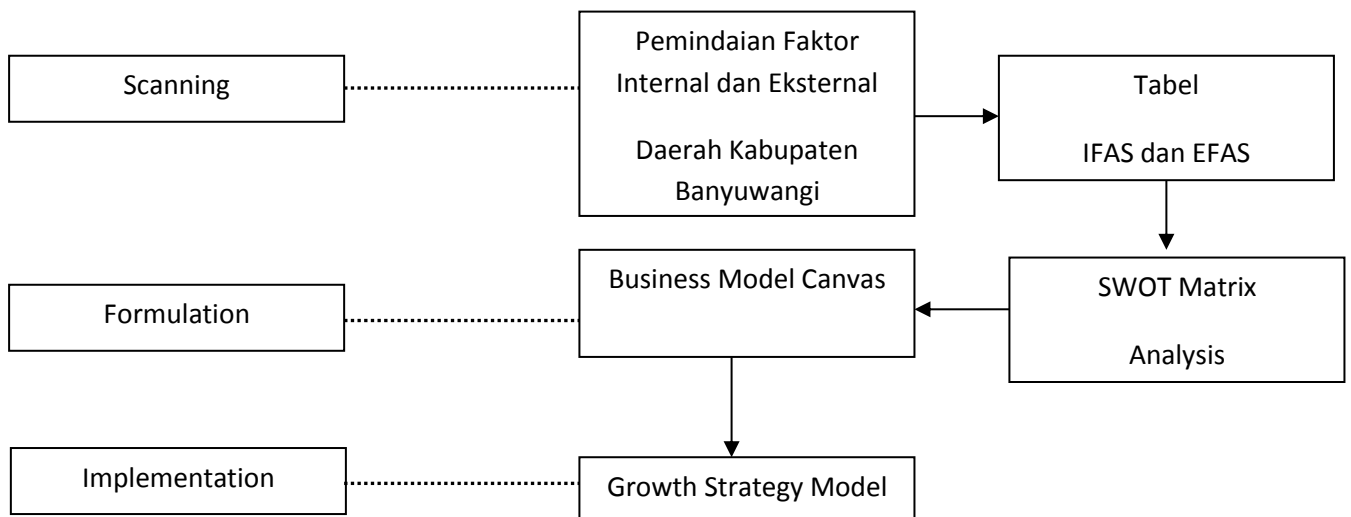
METODOLOGI

SFI merupakan metode untuk menyusun rencana strategi pengelolaan atau Strategic Management. Dimulai dari tahapan Scanning yang merupakan tahapan memindai faktor internal dan eksternal dengan tujuan menemukan faktor – faktor internal dan eksternal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana strategis pengelolaan.

Hasil pemindaian faktor internal dan eksternal dalam tahapan scanning, akan dijadikan dasar analisa faktor apa saja yang berpengaruh dan perlu diperhatikan dalam menyusun strategi. Faktor – faktor tersebut, akan dirumuskan dan diringkas dalam tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary). Tabel IFAS dan EFAS akan dijadikan patokan dalam tahapan formulation dengan menggunakan Importance-Performance Analysis based SWOT analysis.

SWOT Matrix yang dihasilkan Importance – Performance Analysis, memberikan rumusan pilihan strategi untuk mengelola potensi daerah Banyuwangi. Pilihan strategi yang tersedia digambarkan dalam business model canvas untuk dianalisa, Strategi mana yang paling memberikan benefit terbesar dengan biaya terbaik dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pilihan strategi yang tergambar dalam Importance-Performance Analysis based SWOT analysis.

Pilihan strategi yang terbaik berdasarkan pilihan strategi yang tergambar dalam business model canvas, disusun dengan menggunakan model GROWTH Strategy untuk menghasilkan rencana strategi pengelolaan sumber daya daerah kabupaten Banyuwangi. Rencana strategi pengelolaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, forecasting peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan jangka waktu pengelolaan sumber daya yang paling rasional dengan memperhitungkan benefit dari investasi daerah dan cost yang dikeluarkan termasuk risk bearing cost (biaya bantalan resiko) akibat dari adanya moral hazzard dan adverse selection.



Dalam memetakan sumber daya daerah Kabupaten Banyuwangi, Dipetakan sebagai berikut :

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Sumber daya modal
4. Sumber daya kewirausahaan.

Dan, pengelola sumber daya daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi beserta masyarakat Banyuwangi. Sehingga dibagi menjadi dua role play yaitu :

1. Pemerintah sebagai regulator dan pemilik BUMD.
2. Masyarakat sebagai SDM,dan pemilik BUMS .

Masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkan daerah, produk yang datang dari luar daerah, tenaga kerja di BUMS yang berdomisili di daerah, tenaga kerja pemerintah sebagai regulator, serta tenaga kerja BUMD dan BUMN yang berdomisili di daerah.

Pemindaian atau Scanning dilakukan dengan cara memindai :

1. sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi meliputi :
 - a. tambang galian
 - b. hutan
 - c. laut dan pantai
 - d. lahan pertanian
2. sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi meliputi :
 - a. jumlah penduduk usia produktif
 - b. tingkat pendidikan penduduk usia produktif
 - c. jumlah pengangguran usia produktif
3. sumber daya modal meliputi :
 - a. investasi langsung (Foreign direct investment)
 - b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
 - c. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
4. sumber daya kewirausahaan berupa jumlah UMKM
5. Faktor Eksternal meliputi :
 - a. Teknologi
 - b. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pusat (Undang – Undang)
 - c. Iklim sosial, budaya, ekonomi dan politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Scanning

Sumber Daya Alam

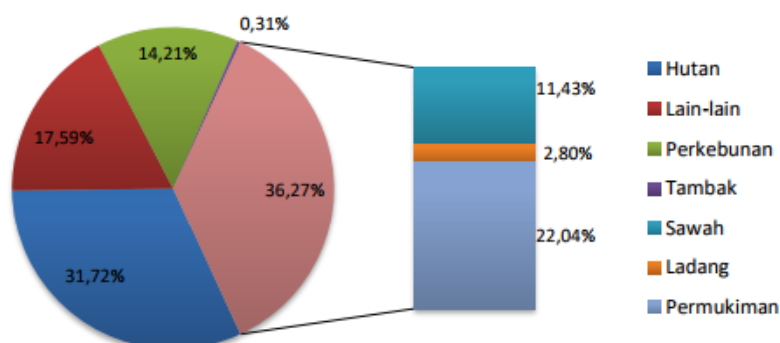
Berdasarkan data dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi memiliki bahan galian vital (Golongan B) berupa emas, perak, tembaga dan mineral pengikat di gunung tumpang pitu kecamatan pesanggaran. Achmad Aminullah (2012) berpendapat bahwa kegiatan penambangan emas melahirkan keuntungan ekonomi, namun mengancam kelestarian lingkungan. Diperkirakan cadangan emas di gunung tumpang pitu lebih dari 60 ton emas. Berupa belerang di kawah ijen dengan potensi belerang yang dapat ditambang sebesar 40 ton / hari.

Bahan galian bukan strategis dan vital (Golongan C) berupa batu gamping di Semenanjung Blambangan Kecamatan Tegal Delimo, Dusun Curah Jati, Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, Desa Ketapang dan Kapuran Kecamatan Kalipuro, Bangsring dan Wonorejo Kecamatan Wongsorejo dengan sebaran total 325 Km². Bahan galian berupa clay atau lempung tersebar di kecamatan wongsorejo, Glagah, Kabat, Rogojampi, Muncar dan Tegal Delimo dengan cadangan diperkirakan mencapai 5.430.000 m³. Bahan galian batuan beku andesit tersebar di Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kabat, Kecamatan Pesanggaran,

Kecamatan Glenmore dengan cadangan diperkirakan 1.185.000 m³. Berupa sirtu tersebar di hampir setiap aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi dengan perkiraan cadangan 1.185.000 m³.

Kondisi Wilayah Kabupaten Banyuwangi		
Kawasan Hutan	183.396,34 ha	31,72% total luas wilayah
Kawasan Persawahan	66.152 ha	11,44% total luas wilayah
Kawasan Pekebunan	82.143,63 ha	14,21% total luas wilayah
Pemukiman	127.454,22 ha	22,04% total luas wilayah
Panjang Garis Pantai	175,8 km	
Jumlah Pulau	10 buah	

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Sumber Daya Manusia

Data Penduduk Usia Produktif Kabupaten Banyuwangi 2016					
L/P \ Usia	15 – 24	25 – 34	35 - 44	45 – 54	55- 64
Laki - Laki	128.823	123.396	132.455	119.246	84.248
Perempuan	151.272	120.242	136.672	123.102	81.320
Total	280.095	243.638	269127	242.348	165.568

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2016, diolah

Presentase Penduduk Usia Produktif Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2016								
L/P \ Lulusan	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA & SMK	D1,D2, D3	D4 & S1	S2 & S3	Total
Laki - Laki	14,84	39,07	22,24	18,44	1,16	3,93	0,32	100
Perempuan	25,83	34,34	18,43	18,54	0,6	2,20	0,06	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah

Dari data, Dapat tergambar bahwa lebih dari 70% penduduk berusia produktif tidak tamat SMA & SMK sederajat. Sehingga 70% penduduk berusia produktif berpotensi sebagai tenaga kerja UnSkill.

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Bekerja (orang)	Pengangguran (orang)
2009	850.200	817.740	34.460
2010	826.261	793.846	32.415
2011	817.786	787.410	30.376
2012	870.948	841.317	29.631
2013	865.747	825.108	40.639
2014	841.190	780.835	60.335
2015	893.816	871.029	22.787

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah

Sumber Daya Modal

Investasi Langsung (FDI) di Banyuwangi

	2011	2012	2013	2014	2015
Investasi Langsung dalam milyar rupiah	1.760	730	2.450	2.345	3.065

Sumber: RPJMD Kab.Banyuwangi 2016 – 2012 dan RKPD Kab.Banyuwangi 2017,diolah

PDRB Kabupaten Banyuwangi

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB (Milyar Rupiah)	32.464	36.951	42.108	47.365	53.406	60.218

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, diolah

Realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi (dalam Milyar Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan	1.450	1.690	1.917	2.419	1.502
Belanja	1.443	1.682	1.886	2.296	1.102

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Sumber Daya Kewirausahaan

Yanto Chandra(2017) menerangkan, Kewirausahaan sosial sebagai sarana untuk melepaskan individu yang terpesona pada ideologi. Dengan berwirausaha seorang individu tidak hanya berfokus memikirkan dirinya melainkan orang lain seperti karyawan dan konsumen. Sehingga kewirausahaan merupakan motor dari ekonomi. David S. Lucas dan Caleb S. Fuller(2017) mengingatkan bahwa, peraturan dapat mengurangi produksi dan mengalihkan usaha kewirausahaan

untuk menangkap nilai yang ada. Karena sifat peraturan adalah membatasi. Sehingga peraturan yang kurang bijak menjadi penghambat usaha pengusaha yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga pembuat peraturan harus benar – benar berhati – hati dan bijak dalam membuat peraturan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2015, UMKM Banyuwangi mencapai jumlah 269.267 pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Banyuwangi tahun 2015 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2016, diolah 1.668.438. Dapat dikatakan 16% penduduk banyuwangi adalah pelaku usaha UMKM.

Faktor Eksternal

Teknologi

Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, penggunaan teknologi di Banyuwangi juga memiliki perkembangan mulai dari perijinan online, pemasaran produk UMKM melalui internet oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi, aplikasi banyuwangi dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangan teknologi saat ini ?

Saat ini sudah mulai berkembang teknologi baru seperti teknologi VR dan AR, Eye image capture Technology, Advance Machine Learning yang merupakan tahap lanjut dari teknologi kecerdasan buatan, dan pemuliaan genetika. Berdasarkan pengamatan pribadi atau observasi penggunaan teknologi di Kabupaten Banyuwangi, tidak semua teknologi baru yang saya sebutkan tersebut belum diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.

Eye image capture yang merupakan teknologi tahap lanjut dari finger print, sudah digunakan oleh dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk perekaman E- KTP. Untuk teknologi pemuliaan genetika sudah diterapkan dibidang pertanian untuk penciptaan bibit unggul. Sedangkan untuk teknologi VR dan AR belum diterapkan di Banyuwangi kecuali di video game. Teknologi Advance Machine Learning juga belum diterapkan di Banyuwangi.

Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat memiliki pengaruh terhadap daerah. Hal tersebut, disebabkan daerah adalah bagian dari pusat. Namun, sejak diterbitkannya UU no 22 tahun 1999, Pemerintahan di Indonesia sudah tidak lagi terpusat, melainkan terdesentralisir ke daerah – daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan UU no 22 tahun 1999, Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Berdasarkan UU no 34 tahun 2004, Negara (Pemerintah Pusat) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenaga kerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan undang – undang no 23 tahun 2014, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

UU no 23 tahun 2014 menjelaskan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud, yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud, yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud, yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud, kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Kebijakan pusat untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia seperti program kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat dan program pusat lainnya seperti bidik misi merupakan peluang tersendiri untuk meningkatkan mutu SDM di Banyuwangi.

Iklim Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Saat ini Indonesia tetap memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Dan Indonesia secara sosial memiliki ragam budaya, suku dan agama. Ekonomi Indonesia bersifat campuran sehingga pengaruh asing yang masuk cukup beragam. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kecenderungan politik Indonesia adalah menjaga perdamaian sehingga Investor asing yang masuk ke Indonesia termasuk Kabupaten Banyuwangi berasal dari beragam negara. Dengan kestabilan ekonomi dan politik di Banyuwangi, mengundang kepercayaan investor baik yang nasional maupun asing. Ditambah dengan kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Pemkab Banyuwangi ditahun 2016, 2,7 juta wisatawan domestik dan 75 ribu wisatawan luar negeri berkunjung di Banyuwangi.

Tabel Internal Factor Analisis Summary

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Terbobot	Keterangan
Sumber Daya Alam	0,2	3	0,6	Sumber daya alam banyuwangi sangat potensial.
Sumber Daya Manusia	0,2	2	0,4	Sumber daya manusia di Banyuwangi 70 % tidak tamat SMA sederajat sehingga keahliannya cenderung ke tenaga kasar atau unskilled labor
Sumber Daya Modal	0,2	4	0,8	Sumber daya modal Banyuwangi cenderung naik siring meningkatnya investasi langsung di Banyuwangi
Sumber Daya Kewirausahaan	0,4	4	1,6	16 % penduduk Banyuwangi adalah pengusaha UMKM, Sehingga meskipun lebih dari 70% penduduk Banyuwangi tidak tamat SMA sederajat, masih bisa terserap di usaha informal atau UMKM.
Total	1	14	3,4	
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Terbobot	Keterangan
Teknologi	0,4	4	1,6	Pemerintah Banyuwangi sudah menerapkan teknologi terbaru meskipun belum semua teknologi terbaru diterapkan di Banyuwangi
Kebijakan Pemerintah Pusat	0,3	3	0,9	Kabupaten Banyuwangi tunduk pada perundang – undangan yang berlaku. Dan pusat menghormati aturan – aturan daerah selama tidak melanggar perundang – undangan
Iklim Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik	0,3	3	0,9	Kabupaten Banyuwangi mengikuti politik pusat dengan politik bebas aktif, keberagaman budaya dan agama serta iklim ekonomi yang saat ini masih stabil.
Total	1	10	3,4	

Importance – Performance Swot Matrix Analysis

PERFORMANCE	Strength VS Threat	Strength VS Opportunities
	Sumber daya alam khususnya emas, dengan teknologi pengolahan merkuri yang diterapkan belum menjamin kewanan biota laut khususnya didaerah tumpang pintu sehingga berpotensi mengancam kelestarian laut daerah sekitar penambangan serta berpotensi merusak lingkungan.	Sumber daya alam Banyuwangi yang berupa bahan galian yaitu emas, lempung, sirtu dan belerang bukan sumber daya alam yang dikuasai oleh pusat berdasarkan UU no 23 tahun 2014 sehingga dapat dikelola daerah untuk kemakmuran masyarakat Banyuwangi tanpa adanya bagi hasil dengan pusat.
	Globalisasi dan kapitalisasi dalam hal persaingan bisnis, mungkin menjadi ancaman bagi UMKM di Banyuwangi. Namun, dengan sumber daya alam yang unggul, investasi langsung yang masuk dapat menyerap tenaga kerja dan menjadi mitra baru UMKM Banyuwangi	Kunjungan wisatawan yang terus meningkat menjadi daya dukung keberlangsungan usaha umkm yang dikelola oleh 16% penduduk Banyuwangi dan mungkin bisa di tingkatkan.
	Weakness VS Opportunities	Weakness VS Threat
Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan SDM Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan SDM Banyuwangi	karena banyaknya unskilled labor dan adanya kapitalisasi serta ketidak mampuan menyerap teknologi terbaru menimbulkan konflik sosial seperti kasus penambangan emas di tumpang pitu.	
Sumber daya modal yang masuk,dan perkembangan teknologi belum mampu diserap oleh umkm banyuwangi dengan 70% unskilled labor.		
	Importance	

Partner	Activities	Value Proposition	Customer Relationship	Customer Segment
1. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 2. Investor. 3. Masyarakat	Mengeluarkan, meninjau dan melaksanakan kebijakan	Economic Welfare	1. Penyuluhan 2. Hibauan	1. Masyarakat Banyuwangi 2. Wisatawan 3. Investor
	Resource 1. APBD 2. Pegawai pemerintah		Chanel 1. Website 2. Aplikasi Android 3. Kantor kedinasan	
Cost 1. Belanja Rutin 2. Belanja Khusus		Revenue 1. Pajak 2. Dana Hibah dan Pembebasan Investasi		

Goal	Reality
Peningkatan PDRB Kabupaten Banyuwangi	PDRB Banyuwangi terus meningkat
Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Banyuwangi	70% penduduk Banyuwangi tidak tamat SMA sederajat
Eksplorasi Sumber daya alam ramah lingkungan	Eksplorasi emas mencemari lingkungan
Opportunity	Threat
Bahan galian tambang yang dimiliki Banyuwangi seperti emas, lempung dan sirtu tidak dikelola pusat berdasarkan UU no 23 tahun 2014	Eksplorasi emas di tumpang pitu mencemari lingkungan
Will	How
PDRB yang terus meningkat akan terus dipertahankan	Untuk mempertahankan peningkatan PDRB, Kemudahan perizinan usaha dan investasi di Banyuwangi dan perbaikan regulasi terus dilakukan
Penduduk Banyuwangi akan didorong untuk bersekolah dan kejar paket untuk meningkatkan mutu SDM di Banyuwangi	Untuk meningkatkan mutu SDM di Banyuwangi, program pusat kartu Indonesia Pintar dan bidik misi disosialisasikan kepada masyarakat agar mensekolahkan anaknya sampai lulus strata 1
Eksplorasi ramah lingkungan khususnya emas di tumpang pitu sudah selayaknya dilakukan.	Peraturan daerah tentang kadar merkuri dikeluarkan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan karena limbah merkuri .

DAFTAR PUSTAKA

- David S. Lucas , Caleb S. Fuller (2017). *Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive—Relative to what?*. Elsevier
- Yanto Chandra (2017). *Social entrepreneurship as emancipatory work*. Elsevier
- Derby (2010). *Enterprise Growth Strategy*. GVA Grimle
- Alexandre Joyce, Raymond L. Paquin (2016). *The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models*. *Journal of Cleaner Production*
- Denise Lindsey Wells (1998). *Strategic Management for Senior Leaders: A Handbook for Implementation*. Washington : Department of the Navy – USA
- Boonyarat Phadermroda, Richard M. Crowder, Gary B. Willsa (2016). *Importance-Performance Analysis based SWOT analysis*. Elsevier
- Ulrich Ernst ,Marina Krivoshlykova ,Donald R. Snodgrass , James Packard Winkler (2004). *Enterprise Growth Initiatives: Strategic Directions and Options*. Bureau : U.S. Agency for International Development, Bureau of Economic Growth, Agriculture, and Trade.
- Zeynel Abidin Polat, Mehmet Alkan , Hicret Gürsoy Sürmeneli (2017). *Determining strategies for the cadastre 2034 vision using an AHP-Based SWOT analysis: A case study for the turkish cadastral and land administration system*. Elsevier
- Miguel Angel Toro-Jarrín, Idalia Estefania Ponce-Jaramillo, David Güemes-Castorena (2016). *Methodology for the of building process integration of Business Model Canvas and Technological Roadmap*. Elsevier